

**TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK
DISUMPAH KARENA KETERBELAKANGAN MENTAL DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 104/Pid.B/2013/PN.LB.BS)

Sindura Debri Walanti dan Bagas Pradikta Haryanto

Email : sinduradw@gmail.com

FH UNS Surakarta

ABSTRACT

This study aims to determine whether the provision of statements of witnesses who are not sworn as clicking natural mental retardation is not contrary to the KUHP and how the attitude of the judges in considering the testimony of witnesses who are not sworn as mentally retarded to decide cases of sexual violence in the Lubuk Basung First Instance Court. This research includes the study of normative law with prescriptive nature. The approach used by the researchers is a case study. Source of data used in the writing of this law is the secondary data, which use materials that can be ruling literature, legislation, documents, books, and literature related to the problem under study. Technical analysis is a method of data used by the pattern of thinking deductive syllogism. Based on this study we concluded that the witness testimony given by witnesses with mental retardation with no sworn not contradict or are in accordance with the provisions of the KUHP. Probative value attached to the sworn testimony of the witnesses who are not able to strengthen the confidence of Judges and can be used as a guide for an additional judge and as valid evidence, as long as the information is in accordance with other valid evidence.

Keywords: *Evidence, Witness Description without Oath, Mental Retardation, Sexual Violence, KUHP.*

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan suatu tahap dalam proses untuk mencari kebenaran materiil yang memiliki peranan penting. Hal tersebut karena pembuktian merupakan tahapan yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan (M. Yahya Harahp, 2010:273). Dalam hal pembuktian, salah satunya dengan alat bukti. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama dalam perkara pidana, dikarenakan hampir semua pemeriksaan hukum acara pidana selalu mengacu pada keterangan saksi di persidangan. Karena dengan alat bukti keterangan saksi akan lebih mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Namun tidak semua keterangan saksi bisa menjadi alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil yaitu seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana. Seseorang yang akan bersaksi memiliki kewajiban untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu agar keterangannya dianggap sah atau memenuhi syarat formil. Dalam hal

ini kesaksiannya masih tidak dapat dijamin kebenarannya, mengingat adanya kesaksian-kesaksian yang berlawanan ataupun tidak ada persesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lainnya dalam satu perkara persidangan yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu kasus yang penulis kaji yaitu mengenai kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga terhadap perempuan yang mengalami keterbelakangan mental di Pengadilan Lubuk Basung. Duduk perkaranya adalah mengenai kekerasan seksual yang dilakukan Zainal Pgl. Nal sebagai Terdakwa terhadap Korban kekerasan seksual yaitu Jasmani Pgl. Ijaih. Berdasarkan perbuatan tersebut, kemudian dilaporkanlah tindakan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga tersebut kepada pihak yang berwajib yang kemudian dilanjutkan pada proses pengadilan. Saksi korban dalam hal memberikan keterangannya tidak disumpah karena mengalami keterbelakangan mental. Namun keterangan saksi korban tersebut dikuatkan dengan adanya alat bukti lain yaitu *visum et repertum* dari dokter. Atas dasar perkara di atas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan juga Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam proses pembuktian di persidangan terdapat keterangan saksi korban yang diberikan

tanpa sumpah. Maka, berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dapat dibahas yaitu mengenai kesesuaian antara keterangan saksi tanpa sumpah dengan KUHAP dan sikap Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pemeriksaan perkara kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan studi kasus (*case study*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa putusan, peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun metode penalaran penelitian atau teknis analisis data yang digunakan yaitu metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Pembuktian Perkara Kekerasan Seksual dengan Keterangan Saksi yang Tidak Disumpah Karena Keterbelakangan Mental dengan Ketentuan KUHAP.

Dalam kasus ini, Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, Dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Berdasarkan kasus ini, terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan Dakwaan Kesatu, terdakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau Dakwaan Kedua, terdakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dalam dalam Pasal 286 KUHPidana.

Hukum Pembuktian itu sendiri menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, yaitu merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima,

menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2001:10). Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”. Sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut, menentukan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wetteijk stelsel*). Yang mana dalam sistem pembuktian ini merupakan kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* atau keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*). Keyakinan hakim dalam penilaian salah satunya seorang terdakwa dimunculkan dalam pertimbangan putusan yaitu penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengaitkan itu dengan cara dan dengan alat bukti yang sah.

Dalam hukum pidana keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dimana saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengetahui atas terjadinya suatu tindak pidana. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas dari aparat penegak hukum dengan mengingat dalam kejahatan-kejahatan yang secara sistematis terorganisir sudah barang tentu pihak-pihak yang terkait

dalam kejahatan mengetahui aktor utama sebagai otak pelaku kejahatan tersebut.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama dalam perkara pidana, dikarenakan hampir semua pemeriksaan hukum acara pidana selalu mengacu pada keterangan saksi di persidangan. Namun tidak semua keterangan saksi bisa menjadi alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang berasal dari suatu peristiwa yang di dengar, lihat dan dialami sendiri. Sehingga keterangan saksi yang berasal dari pengalaman orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti di persidangan. Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti apa yang saksi nyatakan dalam sidang. Dari ketentuan tersebut berarti keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah bukan apa yang saksi nyatakan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), melainkan apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan.

Untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan anatar keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dijelaskan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan: (M.Yahya Harahap, 2012:290-291)

- a. Persesuaian antara keterangan saksi
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain

c. Alasan saksi memberikan keterangan tertentu

Pada hakikatnya, KUHAP menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan. Ketentuan mengenai kesaksian yang diatur dalam KUHAP salah satunya adalah dalam memberikan kesaksian seseorang harus disertai dengan sumpah sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang menegaskan bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi wajib mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing. Namun, KUHAP sendiri memberikan pengecualian untuk memberikan kesaksian tanpa sumpah (Pasal 171 KUHAP) apabila kesaksian tersebut diberikan oleh:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam hal ini Terdakwa ZAINAL Pgl. NAL telah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan cara pemaksaan, yang mana korban adalah anak tirinya, JASMANI Pgl. IJAIH. Yang mengakibatkan saksi JASMANI Pgl. IJAIH mengalami kehamilan dan merasakan sakit pada kemaluannya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 07.00 Wib saksi JASMANI Pgl. IJAIH merasakan sakit perut yang amat sangat hingga mengalami keguguran pada usia kehamilan lebih kurang 4 (empat) bulan.

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengasaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Dan dapat dilihat juga mengenai penjelasan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan /atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu”. Kekerasan seksual (*sexual Abuse*) merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 8, meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dengan demikian kasus kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa Zainal Pgl. Nal terhadap saksi korban Jasmani Pgl. Ijaih

tersebut dapat dimasukkan ke dalam kekerasan dalam rumah tangga, karena pelakunya merupakan orang dalam lingkup rumah tangga, yaitu terdakwa merupakan ayah tiri dari saksi korban, dan saksi korban merupakan anak tiri dari terdakwa.

Pada kasus di atas, Terdakwa Zainal Pgl. Nal dalam melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut telah melakukan pemaksaan kepada saksi korban Jasmani Pgl. Ijaih. Yang diketahui bahwa saksi korban mengalami keterbelakangan mental karena mengalami cacat fisik dan mental sejak kecil, dimana untuk duduk saja harus dibantu oleh orang lain.

Melihat kembali pada dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa Zainal Pgl. Nal oleh penuntut umum, perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana, “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dalam literatur hukum pidana pengertian “tidak berdaya” terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pertama, tidak berdaya mutlak/absolut, artinya secara kejiwaan ia adalah orang yang masih bebas untuk berkehendak namun secara fisik orang tersebut mutlak tunduk dan dikuasai oleh orang lain. Ia diibaratkan hanya alat belaka;
- b. Kedua, tidak berdaya secara relatif, artinya secara fisik orang tersebut bebas untuk bertindak namun secara kejiwaan ia tidak bebas untuk

berkehendak. Kehendaknya ditentukan oleh orang lain

Namun dalam kasus ini ke “tidak berdayaan”, adalah terletak pada diri korban sendiri atau bersumber pada diri korban sendiri, bukan berasal dari orang lain. Dan hal tersebut dapat berasal dari atau ia mempunyai mental illness seperti retardasi mental, *schizophrenia*, *autism*, cacat mental, cacat fisik, dan lain-lain (Ferryal Basbeth, dkk, 2008:13-16). Menurut Kanter dan Sianturi bahwa, “yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai “dungu”, setengah matang atau *idiotisme*, *imbeciliteit*, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang” (E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 1982:258.)

Sesuai dengan penjelasan di atas, bahwa saksi korban Jasmani Pgl. Ijaih mengalami keterbelakangan mental, sehingga dalam pemeriksaan di persidangan saksi korban Jasmani Pgl. Ijaih tidak disumpah. Dengan demikian saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan dengan tidak disumpah karena mengalami keterbelakangan mental, termasuk ke dalam golongan saksi, seperti yang sudah dijelaskan di atas dalam Pasal 171 butir b KUHP yaitu Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Dalam penjelasan Pasal 171 KUHP, dijelaskan mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu

penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Sesuai juga menurut A.Karim Nasution yang mana menggolongkan pengecualian saksi *Absolute onbevoegd*, yaitu mutlak tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena umurnya masih muda atau sakit ingatannya. Bahwa terhadap orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa sangat berbahaya untuk diperiksa sebagai saksi. Karena menurut KUHP, orang-orang seperti itu tidak bisa dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Oleh karena itu, sebaiknya jangan mengajukan saksi orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa.

Seseorang saksi dapat dinyatakan tidak disumpah dalam memberikan keterangannya di dalam pemeriksaan persidangan, harus memenuhi unsur atau syarat keterangan saksi yang sah. Dan mengenai nilai kekuatan pembuktian saksi yang tidak disumpah ada baiknya melihat kembali masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Apabila ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dalam sidang pengadilan, yaitu karena :

- a. Karena saksi menolak bersumpah
- b. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah
- c. Karena Hubungan Keluarga
- d. Saksi termasuk golongan dalam Pasal 171 KUHP

Keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat saksi hadir dalam persidangan, saksi harus bersumpah, saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami dengan menyebutkan dasar pengetahuannya. Kekuatan pembuktian keterangan saksi dan penilaian alat bukti keterangan saksi dalam hukum pembuktian terdapat dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP, yaitu Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Dan juga pada penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHP yang menyatakan keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Dari keterangan yang diberikan oleh saksi korban Jasmani Pgl. Ijaih tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut. Dalam hal tersebut kemudian digunakan Majelis Hakim untuk menemukan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Dan membandingkan antara fakta-fakta yang muncul dan terbukti di persidangan dari keterangan saksi korban yang mengalami keterbelakangan mental yang diberikan tanpa disumpah. Dan ternyata terdapat kesesuaian antara keterangan saksi korban yang diberikan tanpa sumpah karena mengalami keterbelakangan mental dengan alat bukti yang lainnya dalam kasus kekerasan seksual tersebut. Dapat dilihat dalam salah satu pertimbangannya, Majelis

Hakim menyatakan bahwa telah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya antara keterangan Terdakwa Zainal Pgl. Nal yang dihubungkan dengan barang bukti berupa surat Visum et Repertum.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menarik sebuah benang merah bahwa keterangan saksi yang diberikan oleh saksi korban Jasmani Pgl. Ijah yang mengalami keterbelakangan mental dengan tanpa sumpah tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 butir b KUHAP, yang menyebutkan pengecualian bagi orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali dengan tanpa disumpah. Selain itu orang yang mengalami keterbelakangan mental tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, sehingga dalam memberikan keterangannya atau kesaksiannya ada pengecualian untuk tidak mengucapkan sumpah. Dan berdasarkan Pasal 161 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa pada intinya keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi dapat menguatkan keyakinan hakim. Dengan menghubungkan antara keterangan saksi saksi korban yang mengalami keterbelakangan mental dengan alat bukti yang lainnya yang telah memunculkan fakta-fakta di dalam persidangan, maka berdasarkan keyakinan dan pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang tidak disumpah karena keterbelakangan mental dengan keterangan saksi yang satu

dengan yang lainnya antara keterangan Terdakwa Zainal Pgl. Nal yang dihubungkan dengan barang bukti berupa surat Visum et Repertum. Dengan demikian dalam pembahasan dari rumusan masalah yang pertama ini telah terdapat kesesuaian dengan ketentuan dalam KUHAP mengenai pembuktian dalam perkara kekerasan seksual dengan keterangan saksi yang tidak disumpah karena mengalami keterbelakangan mental

1. Sikap Hakim dalam Mempertimbangkan Keterangan Saksi yang Tidak Disumpah Karena Keterbelakangan Mental Untuk Memutus Perkara Kekerasan Seksual.

Hukum Acara Pidana pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya, untuk mengetahui kebenaran tersebut maka diperlukan alat bukti yang menunjang proses pemeriksaan di persidangan. Menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan saksi adalah seorang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Saksi (pelapor atau korban) sudah memiliki kontribusi penting sejak dimulainya proses penanganan perkara pidana (penyelidikan), demikian juga dalam proses selanjutnya, yaitu pemeriksaan

di tingkat penyidikan maupun pembuktian di muka sidang pengadilan yang berupa keterangan saksi. Dalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP, menjelaskan mengenai pengertian keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan rumusan masalah sebelumnya, ketentuan mengenai kesaksian yang diatur dalam KUHAP salah satunya adalah dalam memberikan kesaksian seseorang harus disertai dengan sumpah sesuai dengan bunyi Pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”

Dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa saksi korban Jasmani Pgl. Ijaih bukan termasuk dalam pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya seperti yang disebutkan dalam Pasal 168 KUHAP. Namun saksi korban Jasmani Pgl. Ijaih merupakan saksi yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tetapi tanpa sumpah, seperti yang tertulis di dalam Pasal 171 KUHAP. Saksi korban Jasmani Pgl. Ijaih yang mengalami keterbelakangan mental yang mana mengalami cacat fisik dan

mental sejak kecil, sehingga termasuk dalam Pasal 171 butir b KUHAP yang menyatakan bahwa orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, keterangan saksi yang diberikan tanpa disumpah bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP yang menyatakan keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka keterangan saksi tanpa sumpah karena keterbelakangan mental dalam kasus kekerasan seksual bukan merupakan sebagai alat bukti yang sah namun keterangannya dapat menguatkan keyakinan hakim.

Seperti yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada intinya menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut,

menentukan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wetteijk stelsel*). Yang mana merupakan kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* atau keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*). Keyakinan hakim dalam penilaian salah tidaknya seorang terdakwa dimunculkan dalam pertimbangan putusan yaitu penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengaitkan itu dengan cara dan dengan alat bukti yang sah.

Menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dijelaskan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan (M.Yahya Harahap, 2012:290-291) :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c. Alasan saksi memberikan keterangan tertentu

Bertitik tolak untuk mengambil suatu kesimpulan umum dalam hal ini ialah Pasal 185 ayat (7) KUHAP dengan tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2), maupun Pasal 169 ayat (2) dan penjelasan Pasal 171, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut (M.Yahya Harahap, 2012:293) :

- a. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai “bukan merupakan alat bukti yang sah”. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, namun sifatnya tetap “bukan merupakan alat bukti”.
- b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Karena sifatnya bukan merupakan alat bukti yang sah, maka dengan sendirinya tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.
- c. Akan tetapi “dapat” dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah dan juga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, yang dapat “menguatkan keyakinan hakim” seperti yang disebutkan dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP dan dapat dipakai “sebagai petunjuk” seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai “tambahan” alat bukti maupun untuk “menguatkan keyakinan hakim” atau sebagai “petunjuk”, harus diikuti dengan syarat:

- a. Harus lebih dulu ada alat bukti yang sah, misal ada alat bukti

- keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, atau keterangan terdakwa.
- b. Alat bukti yang sah telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - c. Antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian.

Namun hakim tidak terikat untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah meskipun terdapat persesuaian dengan alat bukti yang sah. Karena untuk mempergunakannya tergantung kepada pendapat penilaian hakim yang mana hakim bebas untuk mempergunakannya, dengan maksud hakim dapat mempergunakannya tapi juga dapat mengesampingkannya. Dan hakim tidak terikat untuk menilainya, dengan maksud hakim dapat menilai dan dapat mempergunakannya sebagai tambahan pembuktian atau menguatkan keyakinan maupun sebagai petunjuk, dengan kata lain tidak ada kewajiban mesti untuk menilainya.

Dalam kasus ini, saksi korban yang mana mengalami keterbelakangan mental ini telah mengalami perbuatan atau tindakan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan seksual seksual itu sendiri adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku

dan korban. Kekerasan/pelecehan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. (Marcheyla Sumera, 2013:46-47)

Dalam kasus ini, pada pokoknya saksi korban Jasmani Pgl. Ijaih dalam kesaksiannya menerangkan bahwa kejadian perbuatan kekerasan seksual terhadap saksi korban terjadi pada tahun 2013 di dalam rumah di Muaro Kandang Jorong Tapian Kandis Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam. Perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh Terdakwa Zainal Pgl.Nal terhadap saksi korban. Yang mana terdakwa adalah suami sah dari ibu saksi, yang mana merupakan ayah tiri saksi dan tinggal dalam satu lingkup rumah tangga bersama saksi. Pada saat itu saksi sedang duduk diruang tamu, kemudian terdakwa mendekati saksi dan mengangkat saksi serta membawanya ke dalam kamar. Sesampainya di kamar terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “aniang sajo yo dan jan agiah tau ibu” yang artinya “diam saja ya dan jangan beritahu ibu” dan saksi tidak dijanjikan berupa hadiah apapun oleh terdakwa agar mau berhubungan badan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa membuka celana pendek yang saksi kenakan, dan kemudian terdakwa membuka celananya yang dikenakan dan langsung menindih saksi dan

kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan saksi. Saksi merasakan adanya cairan (sperma) dalam kemaluan saksi ketika alat kelamin terdakwa masih berada dalam kemaluan saksi. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) dalam kemaluan saksi, kemudian terdakwa langsung menarik alat kelaminnya keluar dari kemaluan saksi dan memasang kembali celananya. Setelah kejadian tersebut, saksi sering mengalami sakit perut yang kemudian oleh saksi Kartini Pgl. Kar (ibu saksi) dibawa dan diperiksa di Puskesmas Bawan, dan ternyata saksi mengalami kehamilan. Kemudian saksi mengalami keguguran dengan keluarnya darah segar yang bergumpal dari kemaluan saksi. Berdasarkan keterangan dari saksi korban Jasmani Pgl. Ijaih tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka didapatlah fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2013 di dalam suatu rumah di muaro kandang Jorong Tapian Kandis Nagari Salareh Aia Kec. Palembayan Kab. Agam ;
- b. Terdakwa adalah ayah tiri dari saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH dan tidak ada ikatan pernikahan antara terdakwa dengan saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH ;
- c. Saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH tinggal bersama terdakwa dan saksi KARTINI Pgl. KAR dalam satu rumah di muaro kandang Jorong Tapian Kandis Nagari Salareh Aia Kec. Palembayan Kab. Agam ;
- d. Cara terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut adalah ketika terdakwa pulang dari sawah, terdakwa melihat saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH sedang duduk di ruang tamu sendirian memakai celana pendek selutut maka timbul hasrat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban Ijaih, kemudian terdakwa mendekati saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH dan mengatakan “maancuak wak JAS” kemudian di jawab oleh saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH “ tidak mau yah” sambil terdakwa meraba-raba paha, kemaluan dan paha saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH ;
- e. Terdakwa mengangkat saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH dengan menggendong dan membawanya kedalam kamar karena saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH dalam keadaan cacat tidak bisa berdiri dan berjalan ;

- f. Sesampainya di dalam kamar terdakwa menidurkan saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH diatas kasur dan mengatakan kepada saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH “aniang sajo yo dan jan agiah tau ibu” yang artinya “diam saja ya, dan jangan beritahu ibu” ;
- g. Selanjutnya terdakwa membuka celana pendek yang saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH kenakan, kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya, dan naik keatas kasur dan terdakwa langsung menindih saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH . Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH ;
- h. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya dan saat itu saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH merasakan sakit ;
- i. Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dalam kemaluan saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH sehingga terdakwa merasakan enak. Kemudian terdakwa mengenakan kembali celananya dan pergi meninggalkan saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH ;
- j. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH hamil dan mengalami keguguran pada usia kehamilan lebih kurang 4 (empat) bulan ;

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim dalam menerapkan dakwaan terhadap dakwaan untuk memutus perkara kekerasan seksual ini, lebih tepat pada Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banya Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Yang mana pada Pasal 8 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004, mengenai kekerasan seksual dengan cara pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas menunjukkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan menghubungkan antara keterangan saksi korban tanpa sumpah yang mengalami keterbelakangan mental dengan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya dan dengan keterangan Terdakwa Zainal Pgl. Nal yang dihubungkan dengan barang bukti beserta *Visum et Repertum* telah terdapat kesesuaian.

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap Majelis hakim dalam memutus perkara kekerasan

seksual dalam lingkup rumah tangga yang mana korban mengalami keterbelakangan mental telah menggunakan, mengindahkan dan mempertimbangkan keterangan saksi korban tersebut walau dalam memberikan keterangannya tanpa sumpah. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatukan putusan bersalah kepada terdakwa. Dan sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai yang satu dengan yang lain bukan merupakan alat bukti, melainkan apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Dan seperti yang disebutkan dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP yang mana pada intinya keterangan yg diberikan tanpa sumpah merupakan keterangan yg dapat menguatkan keyakinan hakim. Serta dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP yang telah ditentukan nilai pembuktiannya yang dapat melekat pada keterangan saksi yang tidak disumpah, dapat dipergunakan sebagai petunjuk bagi Hakim selama keterangan saksi tersebut sesuai dengan alat bukti yang sah lainnya, yang dalam hal ini yaitu alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum serta keterangan saksi di bawah sumpah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Saran

- a. Keterangan saksi yang diberikan oleh saksi korban yang mengalami keterbelakangan mental dengan tanpa sumpah telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, dalam Pasal 171 butir b, yang menyebutkan pengecualian dalam memberikan keterangan tanpa disumpah bagi orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali. Dan berdasarkan Pasal 161 ayat (2) KUHAP yang pada intinya keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, bukan sebagai alat bukti yang sah, tetapi dapat menguatkan keyakinan hakim.
- b. Sikap Majelis Hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang mana korban mengalami keterbelakangan mental, telah mempertimbangkan keterangan saksi korban yang mengalami keterbelakangan mental yg diberikan tanpa sumpah, sesuai dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP bahwa dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Dan Pasal 161 ayat (2) KUHAP dapat menguatkan keyakinan hakim. Dan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP, dapat dipergunakan sebagai petunjuk bagi Hakim selama keterangan saksi tersebut sesuai dengan alat bukti yang sah lainnya.

- a. Pemerintah dan negara hendaknya sering melakukan dan meningkatkan program penyuluhan mengenai kekerasan seksual setiap bulannya untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan bahaya tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. Karena perbuatan dari kekerasan seksual tersebut dapat menimbulkan trauma sangat mendalam pada korban.
- b. Majelis Hakim seharusnya dalam Putusannya bisa menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa lebih dari 9 (sembilan) tahun. Karena korbannya merupakannya anak tirinya yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang sama dan diketahui mengalami cacat fisik sejak lahir dan mengalami keterbelakangan mental, yang seharusnya mendapat bimbingan dan perlindungan. Untuk itu seseorang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan harus dikutuk, dengan cara memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku karena aib yang diderita seorang perempuan tidak akan terhapuskan sepanjang

hidupnya. Selain itu perbuatan yang dilakukan pelaku perbuatan kekerasan seksual telah merusak moral dan etika yang ada di masyarakat.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., atas bimbingan dalam penulisan jurnal ini. Beserta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah menjadi tempat kuliah dan tempat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis. Dan UNIBA yang membantu penulis dalam mengupload atau mengunggah jurnal ini ke media-media lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Karim Nasution. 1975. *Masalah hukum pembuktian dalam proses pidana, Jilid I, II, dan III*. Jakarta : Korps Kejaksaan Republik Indonesia.
- Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi Cetakan Kedua)*. Jakarta : Penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Andi hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- , 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi Cetakan Ketiga)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Darwan Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Djambatan.
- Eddy O.S.Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni AHM-PTM, Jakarta.
- H.M.Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Hari Sasangka dan Lily. 2001. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : PT. Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta Sinar Grafika.
- , 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- , 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- R.Subekti. 2008. *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta : CV Akamedia Pressindo.
- Wirdjono Prodjodikoro. 1967. *Perbuatan Melawan Hukum*. Djakarta : Penerbit “Sumur Bandung”.

Jurnal

- Andrey Elby Rorie. 2013. “Tidak Mampu Bertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana dan Pengaturannya di Masa Mendatang”. *Lex Crimen Journal*. Vol. II/No.3, Juli 2013.
- Ferryal Basbeth, dkk. 2008. “Tindak Pidana Kesusilaan Pada Retardasi Mental: Kasus yang belum terjangkau oleh hukum (Laporan Kasus)”. *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*. Vol.1(1): 13-16, 2008. Jakarta : Asosiasi Forensik Indonesia, Indonesia University.

Marcheyla Sumera. 2014. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”. *Lex et Societatis Journal*. Vol.I/No.2. April-Juni 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung
Nomor :
104/Pid.B/2013/PN.LB.BS.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-
004/J.A/11/1993 tentang
Pembuatan Surat Dakwaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga.